



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DINI KUSUMAWATI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL**
3. NHK : **155804**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	14.779.960.000
1. Tanah Seluas 323 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , Rp. 3.115.335.000		
2. Tanah Seluas 234 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , Rp. 2.256.930.000		
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , Rp. 2.893.500.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/53 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.149.260.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/41 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 656.580.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/161 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , Rp. 1.907.045.000		
7. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , Rp. 2.801.310.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	292.000.000
1. MOBIL, JEEP WRANGLER Tahun 2013, HIBAH TANPA AKTA Rp. 292.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	266.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	500.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	734.394.227



F. HARTA LAINNYA	Rp.	100.724.219
Sub Total	Rp.	16.673.078.446
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	16.673.078.446

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.